

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	5
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

DPRD Minta Pemprov DKI Jakarta Kelola dan Kenakan Pajak Menara Telekomunikasi

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho

Anggota [DPRD DKI Jakarta](#) mendesak [Pemprov DKI Jakarta](#) memanfaatkan ruang yang ada, agar bisa meningkatkan [pendapatan daerah](#).

Anggota dewan juga meminta, [Pemprov DKI Jakarta](#) mengubah beberapa item penerimaan yang awalnya berupa retribusi menjadi pajak.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, banyak [menara telekomunikasi](#) di pinggir jalan Jakarta.

Khoirudin menerangkan bahwa pengelolaan pendapatan dari menara itu seharusnya dikelola oleh Bapenda dan dikenakan pajak setiap tahun.

"Semestinya, itu dikelola oleh Bapenda dan bukan retribusi yang kami dapatkan. Seharusnya pajak, karena setiap tower itu punya kesibukan percakapan yang berbeda-beda," kata Khoirudin pada Rabu (8/1/2025).

"Ini Bapenda hanya dapat Rp 1 juta seumur hidup. Seumur hidup, kan nggak logis dan itu bukan (pajak) Bapenda. Itu retribusi," ujar Khoirudin.

Khoirudin menjelaskan bahwa nantinya penarikan pendapatan dari sektor itu bukan berupa retribusi tapi pajak.

Khoirudin menilai, [Pemprov DKI Jakarta](#) memiliki cukup banyak aset yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan warga.

"Pemda punya asetnya, aset jalan. Jadi semua yang dimanfaatkan di badan jalan, harus masuk ke Pemda semaksimal mungkin," jelas Khoirudin.

"Provider kan banyak, sekarang internet menjadi kebutuhan di kehidupan Jakarta. Mestinya pajak dari ruang untuk lalu lintas percakapan, oleh provider maksimal ke Jakarta," ucapnya.

Jika diamati secara saksama, kata Khoirudin, pendapatan pajak yang dilakukan [Pemprov DKI Jakarta](#) merupakan hal yang biasa.

Dianggap biasa, karena 'memaksa' para wajib pajak untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.

"Jadi yang bagus kan kalau pendapatan itu di luar pajak. Walaupun pendapatan kami besar, kami baru 3,5 persen dari kota-kota besar di dunia, di Bangkok, di Kuala Lumpur, masih jauh. Jadi, kami masih harus memikirkan bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan dari luar pajak," tuturnya.

Dengan label Jakarta sebagai kota jasa dan metropolitan, Khoirudin yakin sangat mungkin DKI bisa mengeruk pendapatan dengan maksimal.

Apalagi, banyak pengusaha besar yang bermarkas di Jakarta, sehingga dia akan membahas potensi ini dengan Bapenda.

"Semua pengusaha besar ada di sini, nanti kami bincangkan dengan Kepala Bapenda, karena pajak sejatinya membebani rakyat. Untuk pajak rumah tangga, pajak orang per orang atau pendapatan. Setiap kenaikan pajak pasti teriak, karena itu beban. Negara yang sejahtera mengurangi pajak, dan pemerintah punya ruang untuk mendapatkan pendapatan di luar pajak," papar Khoirudin.

Diberitakan sebelumnya, [Badan Pendapatan Daerah \(Bapenda\)](#) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah hingga Rp 44,46 triliun pada 2024.

Angka ini mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 44,98 triliun.

Kepala Badan Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 43,52 triliun, dengan kenaikan sebesar Rp 936 miliar atau 2,15 persen.

Oleh karena itu pada 2023, realisasi pajak daerah tercatat Rp 43,52 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan 2024.

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan," kata Lusiana pada Rabu (8/1/2025).

Lusiana menyampaikan, menyatakan keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis, termasuk pemutakhiran data objek pajak.

Kemudian adanya kebijakan penagihan pajak secara intensif, serta penguatan sistem digital untuk mempermudah pembayaran pajak.

"Pemprov DKI berharap tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025, di mana target pajak ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar Rp48 triliun," ujar Lusiana. (faf)

Berikut lima kontributor pajak terbesar 2024:

1. Pajak Kendaraan Bermotor: Rp 9,65 triliun (104,68 persen dari target).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp 9,96 triliun (99,62 persen dari target).
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp 6,64 triliun (106,21 persen dari target).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp 6,1 triliun (76,25 persen dari target).
5. Pajak Rokok: Rp 883,98 miliar (98,22 persen dari target).